

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) maupun indikator sasaran (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program prioritas ditetapkan. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Gubernur dan wakil Gubernur dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Penyajian indikator indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan suatu kondisi indikator makro ekonomi dan sosial, seperti laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, persentase penduduk miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator pada aspek Pelayanan Umum memberikan tolok ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan urusan baik wajib maupun pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator kinerja pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran daya dukung mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Penetapan indikator kinerja utama Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tertuang pada Tabel 8.1.

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Utama	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja					Kondisi Kinerja akhir RPJMD
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	Persentase bangunan yang berciri khas melayu	Jumlah bangunan milik Pemerintah dan swasta yang berciri khas melayu dibagi Jumlah bangunan milik Pemerintah dan swasta dikali 100	%	0	5,28	6,02	16,54	32,33	49,70	70,75	70,75
2.	Persentase Warisan Budaya Tangible yang Lestari	Jumlah warisan budaya yang lestari dibagi jumlah warisan budaya dikali 100	%	14,97	18,53	19,58	20,28	20,98	21,68	22,38	22,38
3.	Persentase Mubaligh yang tersertifikasi	Jumlah mubaligh yang lulus kompetensi dibagi mubaligh yang dibina x 100	%	N/A	N/A	N/A	25	50	80	100	100
4.	Persentase santri yang menjadi hafiz	Jumlah santri yang menjadi hafiz dibagi jumlah santri di kepulauan riau dikali 100	%	N/A	N/A	20	40	60	80	100	100
5.	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur	kasus	NA	272	250	230	200	185	150	150
6.	Angka kriminalitas	Jumlah kasus kriminalitas	Kasus	4.892	4.885	4.880	4.875	4.870	4.865	4.860	4.860
7.	Persentase jalan provinsi berkondisi baik	Panjang jalan provinsi berkondisi baik dibagi panjang jalan dikali 100	%	71,37	66,22	67,97	69,73	71,49	73,24	75,00	75,00

No	Indikator Kinerja Utama	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja					Kondisi Kinerja akhir RPJMD
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
8.	Persentase ketersediaan Pelabuhan Penyeberangan (roro)	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan (roro) yang tersedia dibagi Jumlah Pelabuhan Penyeberangan (roro) yang seharusnya tersedia dikali 100	%	57,14	57,14	71,43	71,43	85,71	92,86	100,00	100
9.	Persentase ketersediaan Kapal Penyeberangan (roro)	Jumlah Kapal Penyeberangan (roro) yang tersedia dikali 100	%	77,78	77,78	77,78	77,78	88,89	100	100	100
10.	Persentase ketersediaan Pelabuhan Laut	Jumlah Pelabuhan Laut yang tersedia dibagi jumlah Pelabuhan Laut yang seharusnya tersedia dikali 100	%	58,82	58,82	64,71	73,53	82,35	91,18	100,00	100,00
11.	Persentase ketersediaan Kapal Angkutan Laut	Jumlah Kapal Angkutan Laut yang tersediadibagi Kapal Angkutan Laut yang seharusnya tersedia dikali 100	%	44,44	44,44	55,56	66,67	77,78	88,89	100,00	100,00
12.	Cakupan pelayanan Sanitasi (Air Limbah perkotaan, drainase, persampahan)	Luas wilayah yang memiliki Sanitasi (Air Limbah perkotaan, drainase, persampahan) layak dibagi Luas wilayah dikali 100	%	63,48	65,21	68,48	73,48	78,48	83,48	88,48	88,49
13.	Persentase pelayanan akses air bersih yang aman	Luas wilayah yang memperoleh akses air bersih dibagi Luas wilayah dikali 100	%	72,01	72,01	89,44	92,19	96,79	97,59	100	100
14.	Luas Kawasan Kumuh	Luas Kawasan Kumuh	Ha	823,44	823,44	752,99	627,69	549,53	379,57	255,09	255,09
15.	Rasio Elektrifikasi	Jumlah rumah tangga teraliri listrik dibagi jumlah rumah tangga dikali 100	%	83,72	89,14	89,15	90,50	91,50	92,50	93,50	93,50

No	Indikator Kinerja Utama	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja					Kondisi Kinerja akhir RPJMD
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
16.	Rata-rata Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 ke atas	tahun	9,65	9,67	9,83	9,99	10,15	10,31	10,47	10,47
17.	Persentase SMA/MA/SMK/MAK/S LB yang terakreditasi minimal B	Jumlah sekolah SMA/MA/SMK/MAK/SLB yang terakreditasi B dibagi Jumlah sekolah SMA/SMK/SLB dikali 100	%	75,00	75,80	76,00	78,00	80,00	82,00	84,00	84,00
18.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja dibagi Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja yang terdaftar dikali 100	%	65,07	66	66,3	66,68	67,05	67,43	67,8	67,8
19.	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Jumlah Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dibagi Jumlah Pencari kerja yang terdaftar dikali 100	%	52	54	56	58	60	62	64	64
20.	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	Jumlah Kematian Ibu dibagi jumlah kelahiran hidup dikali 100.000	per 100.000 KH	144	120	132 (rata-rata 2015-2016)	131	130	129	128	128
21.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	Jumlah Kematian Bayi (AKB) dibagi jumlah kelahiran hidup dikali 1.000	per 1.000 KH	35*	35	34	33	32	31	30	30
22.	Persentase kekurangan gizi (underweight) pada anak balita)	Jumlah anak bayi usia 0-59 bulan 29 hari dengan stasis gizi kurus (underweight) dibagi jumlah Jumlah anak bayi usia 0-59 bulan 29 hari dikali 100	%	17,07	17,7	17,4	17,1	16,8	16,5	16,2	16,2
23.	Persentase penduduk miskin	Jumlah penduduk miskin dibagi jumlah penduduk dikali 100	%	5,78	5,84	6,13	6,07	5,98	5,83	5,68	5,68

No	Indikator Kinerja Utama	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja					Kondisi Kinerja akhir RPJMD
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
24.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,20	93,50	93,75	94,00	94,25	94,50	94,75	94,75
25.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	60,79	61,2	61,5	61,8	62,0	62,25	62,5	62,5
26.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	375.412,66	303.411,28	304.019,32	304.628,57	305.239,05	305.850,75	306.463,67	306.463,67
27.	Jumlah produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	33.515,48	33.582,65	33.649,95	33.717,38	33.785,95	33.852,66	33.920,50	33.920,50
28.	Jumlah produk olahan Hasil perikanan (Ton)	Jumlah produk olahan Hasil perikanan (Ton)	Ton	1.315,67	1.318,30	1.320,94	1.323,58	1.326,23	1.328,88	1.331,54	1.331,54
29.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Juta orang	2,03	2,1	2,2	2,25	2,3	2,4	2,5	2,5
30.	Jumlah Produksi tanaman Komoditas Holtikultura	Jumlah Produksi tanaman Komoditas Holtikultura	Ton	14.000	38.338	39.936	41.692	43.239	44.644	45.822	45.822
31.	Jumlah Produksi Tanaman Palawija	Jumlah Produksi Tanaman Palawija	ton	12.637	12.637	12.367	12.679	12.679	12.742	12.742	12.742
32.	Jumlah Produksi Padi	Jumlah Produksi Padi	Ton	959	627	792	850	1.020	1.020	1.020	1.020
33.	Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	%	15,20	12,60	CV < 10	CV < 10	CV < 10	CV < 10	CV < 10	CV < 10

No	Indikator Kinerja Utama	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja					Kondisi Kinerja akhir RPJMD
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
34.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	skor	87,76	88,00	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00	93,00
35.	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	Rp Milyar	10.065	7.108	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100	45.608
36.	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Rp Milyar	1.384	492.5	500	600	700	800	900	3.993
37.	Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Produk diterima dipasar modern atau tersertifikasi	Jumlah Koperasi dan UKM yang memiliki Produk diterima dipasar modern atau tersertifikasi dibagi Jumlah Koperasi dan UKM dikali 100	%	NA	17,8	18,5	19,2	20,19	21,22	22,25	22,25
38.	Jumlah industri berbahan baku lokal	Jumlah industri berbahan baku lokal	unit	1.251	1.276	1.720	1.850	1.969	2.117	2.200	2.200
39.	Nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal	Nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal	Juta US \$	1.112,40	1.185,67	1.258,94	1.332,21	1.405,48	1.478,75	1.550,20	1.550,20
40.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Jumlah PDRB sektor perdagangan dibagi jumlah PDRB dikali 100	%	8,03	8,11	8,19	8,27	8,35	8,44	8,52	8,52
41.	Persentase waduk yang memiliki kualitas air sesuai baku mutu	Jumlah waduk yang memiliki kualitas air sesuai baku mutu dibagi Jumlah waduk yang dilakukan pengujian dikali 100	%	63,64	63,64	72,73	72,73	81,82	90,91	100	100

No	Indikator Kinerja Utama	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja					Kondisi Kinerja akhir RPJMD
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
42.	Proporsi RTH publik di kawasan perkotaan	Luas RTH publik di kawasan perkotaan dibagi Luaswilayah dikali 100	%	10,05	10,21	10,37	10,52	10,68	10,84	10,99	10,99
43.	Indeks Profesionalitas Pegawai	Nilai Perhitungan IPP ASN Provinsi Kepulauan Riau	Nilai	NA	NA	70	72	75	78	80	80
44.	Nilai hasil evaluasi SAKIP	Nilai hasil evaluasi SAKIP	Kategori	CC	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB
45.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skala A - E	B	B	B	B	B	B	B	B
46.	Nilai Keterbukaan informasi publik	Nilai Keterbukaan informasi publik	Skala nilai 0-100	59,5	59,5	62	63,5	65	65	67,5	67,5
47.	Nilai e- government	Nilai e- government	Skala nilai 1-4	1,85	1,85	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,5
48.	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Trilyun Rupiah	1,013	1,079	1,223	1,224	1,330	1,457	1,624	1,624
49.	Opini BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Riau	Opini BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Riau	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
50.	Level Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Level Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Level	1	2	3	3	3	3	3	3

Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kepulauan Riau tertuang pada Tabel 8.2.

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Daerah	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja					Kondisi Kinerja akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat											
1)	Pertumbuhan Ekonomi	(Jumlah PDRB tahun n dikurangi PDRB tahun sebelumnya) dibagi PDRB tahun sebelumnya dikali 100	%	6,02	5,03	2,01	3+1	4+1	5+1	5+1	5+1	Seluruh PD
2)	Laju Inflasi	Laju Inflasi	%	4,40	3,53	4,32	3,50±1	3,50±1	3,50±1	3,50±1	3,50±1	Seluruh PD
3)	Indeks Gini	Indeks Gini	Indeks	0,34	0,35	0,359	0,35±0,01	0,35±0,01	0,35±0,01	0,34±0,01	0,34±0,01	Seluruh PD
4)	Persentase penduduk miskin	Jumlah penduduk miskin dibagi jumlah penduduk dikali 100	%	5,78	5,84	6,13	6,07	5,98	5,83	5,68	5,68	Seluruh PD
5)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73,75	73,99	74,23	74,47	74,71	74,95	75,19	75,19	Seluruh PD
B	Aspek Pelayanan Umum											
1.	Pendidikan											
6)	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 ke atas	tahun	9,65	9,67	9,83	9,99	10,15	10,31	10,47	10,47	Dinas Pendidikan

No	Indikator Kinerja Daerah	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja					Kondisi Kinerja akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
7)	Persentase SMA/MA/SMK/SMAK/SLB yang terakreditasi minimal B	Jumlah sekolah SMA/SMK/SLB yang terakreditasi B dibagi Jumlah sekolah SMA/SMK/SLB dikali 100	%	75,00	75,80	76,00	78,00	80,00	82,00	84,00	84,00	Dinas Pendidikan
2. Kesehatan												
8)	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	Jumlah Kematian Ibu dibagi jumlah kelahiran hidup dikali 100.000	per 100.000 KH	144	120	132 (rata-rata 2015-2016)	131	130	129	128	128	Dinas Kesehatan
9)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	Jumlah Kematian Bayi (AKB) dibagi jumlah kelahiran hidup dikali 1.000	per 1.000 KH	35*	35	34	33	32	31	30	30	Dinas Kesehatan
10)	Persentase kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita)	Jumlah anak bayi usia 0-59 bulan 29 hari dengan stasis gizi kurus (<i>underweight</i>) dibagi jumlah Jumlah anak bayi usia 0-59 bulan 29 hari dikali 100	%	17,07	17,7	17,4	17,1	16,8	16,5	16,2	16,2	Dinas Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
11)	Persentase jalan provinsi berkondisi baik	Panjang jalan provinsi berkondisi baik dibagi panjang jalan dikali 100	%	71,37	66,22	67,97	69,73	71,49	73,24	75,00	75,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Pertanahan

No	Indikator Kinerja Daerah	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja					Kondisi Kinerja akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
4.	Pertanahan											
12)	Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD/Kab/Kota yang terfasilitasi	Jumlah permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD/Kab/Kota yang terfasilitasi dibagi Jumlah permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dikali 100	%	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Pertanahan
5.	Perumahan dan Kawasan Permukiman											
13)	Cakupan pelayanan Sanitasi (Air Limbah perkotaan, drainase, persampahan)	Luas wilayah yang memiliki Sanitasi (Air Limbah perkotaan, drainase, persampahan) layak dibagi Luas wilayah dikali 100	%	63,48	65,21	68,48	73,48	78,48	83,48	88,48	88,49	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
14)	Persentase pelayanan akses air bersih yang aman	Luas wilayah yang memperoleh akses air bersih dibagi Luas wilayah dikali 100	%	72,01	72,01	89,44	92,19	96,79	97,59	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
15)	Luas Kawasan Kumuh	Luas Kawasan Kumuh	%	823,44	823,44	752,99	627,69	549,53	379,57	255,09	255,09	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja Daerah	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja					Kondisi Kinerja akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
16)	Proporsi RTH publik di kawasan perkotaan	Luas RTH publik di kawasan perkotaan dibagi Luas wilayah dikali 100	%	10,05	10,21	10,37	10,52	10,68	10,84	10,99	10,99	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6.	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat											
17)	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur	kasus	NA	272	250	230	200	185	150	150	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
18)	Persentase konflik sosial tertangani	Jumlah potensi konflik sosial tertangani dibagi jumlah potensi konflik sosial dikali 100	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
19)	Persentase desa/kel tangguh bencana	Jumlah desa/ kel yang tangguh dalam menghadapi bencana dibagi Jumlah desa/ kel dikali 100	%	NA	NA	0,72	1,20	1,68	2,16	2,64	2,64	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7.	Sosial											
20)	Persentase keluarga miskin yang meningkat pendapatannya melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	Jumlah keluarga miskin yang meningkat pendapatannya melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	0,19	0,26	0,47	0,99	1,50	2,02	2,53	2,53	Dinas Sosial

No	Indikator Kinerja Daerah	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja					Kondisi Kinerja akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
		dibagi jumlah populasi keluarga miskin dikali 100										
8.	Tenaga kerja											
21)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	Jumlah Pengangguran Terbuka dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100	%	6,20	7,69	7,16	7,02	6,88	6,74	6,60	6,60	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
22)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja dibagi Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja yang terdaftar dikali 100	%	65.07	66	66.3	66.68	67.05	67.43	67.8	67.8	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
9.	Transmigrasi											
23)	Jumlah warga (KK) yang ditempatkan sesuai dengan rencana penempatan	Jumlah warga (KK) yang ditempatkan sesuai dengan rencana penempatan	KK	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471	2.730	2.730	2.730	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
10.	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak											
24)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,20	93,50	93,75	94,00	94,25	94,50	94,75	94,75	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator Kinerja Daerah	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja					Kondisi Kinerja akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
25)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	60,79	61,2	61,5	61,8	62,0	62,25	62,5	62,5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana												
26)	Persentase penggunaan alat kontrasepsi (CPR)	Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi dibagi Jumlah PUS dikali 100	%	46,20	46,50	46,73	47,73	48,73	49,73	50,73	50,73	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
12. Pangan												
27)	Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	%	15,2	12,6	CV<10	CV<10	CV<10	CV<10	CV<10	CV<10	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
28)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	skor	87,76	88,00	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00	93,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
13. Pertanian												
29)	Jumlah Produksi tanaman Komoditas Holtikultura	Jumlah Produksi tanaman Komoditas Holtikultura	Ton	14.000	38.338	39.936	41.692	43.239	44.644	45.822	45.822	Dinas Pertanian, Kesehatan Hewan dan Ketahanan Pangan

No	Indikator Kinerja Daerah	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja					Kondisi Kinerja akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
30)	Jumlah Produksi Tanaman Palawija	Jumlah Produksi Tanaman Palawija	ton	12.637	12.637	12.367	12.679	12.679	12.742	12.742	12.742	Dinas Pertanian, Kesehatan Hewan dan Ketahanan Pangan
31)	Jumlah Produksi Padi	Jumlah Produksi Padi	Ton	959	627	792	850	1.020	1.020	1.020	1.020	Dinas Pertanian, Kesehatan Hewan dan Ketahanan Pangan
14. Lingkungan hidup												
32)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	66,97	66,97	67,70	68,10	68,90	69,20	69,80	69,80	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
15. Kehutanan												
33)	Luas lahan kritis terahabilitasi	Luas lahan kritis terahabilitasi	ha	200	313	243	220	225	230	230	1.661	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
16. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil												
34)	Rasio penduduk ber-KTP	Jumlah penduduk wajib KTP yang sudah mencetak KTP dibagi Jumlah penduduk wajib KTP dikali 100	%	85,4	89,68	90	92	95	98	98	98	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
35)	Rasio anak (0-18 tahun) berakte kelahiran	Jumlah anak (0-18 tahun) berakte kelahiran dibagi Jumlah anak (0-18 tahun) dikali 100	%	64	75	76	77	79	80	82	82	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator Kinerja Daerah	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja					Kondisi Kinerja akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
17.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
36)	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang aktif	Jumlah Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa) yang aktif	BUMDesa	NA	NA	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	55,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
18.	Perhubungan											
37)	Persentase ketersediaan Pelabuhan Penyeberangan (roro)	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan (roro) yang tersedia dibagi Jumlah Pelabuhan Penyeberangan (roro) yang seharusnya tersedia dikali 100	%	57,14	57,14	71,43	71,43	85,71	92,86	100,00	100	Dinas Perhubungan
38)	Persentase ketersediaan Kapal Penyeberangan (roro)	Jumlah Kapal Penyeberangan (roro) yang tersedia dikali 100	%	77,78	77,78	77,78	77,78	88,89	100,00	100,00	100,00	Dinas Perhubungan
39)	Persentase ketersediaan Pelabuhan Laut	Jumlah Pelabuhan Laut yang tersedia dibagi jumlah Pelabuhan Laut yang seharusnya tersedia dikali 100	%	58,82	58,82	64,71	73,53	82,35	91,18	100,00	100,00	Dinas Perhubungan
40)	Persentase ketersediaan Kapal Angkutan Laut	Jumlah Kapal Angkutan Laut yang tersediadibagi Kapal Angkutan Laut yang seharusnya tersedia dikali 100	%	44,44	44,44	55,56	66,67	77,78	88,89	100,00	100,00	Dinas Perhubungan

No	Indikator Kinerja Daerah	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja					Kondisi Kinerja akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
19.	Komunikasi dan Informatika											
41)	Nilai Keterbukaan informasi publik	Nilai Keterbukaan informasi publik	Skala nilai 0-100	59,5	59,5	62	63,5	65	65	67,5	67,5	Dinas Komunikasi dan Informatika
42)	Nilai e- government	Nilai e- government	Skala nilai 1-4	1,85	1,85	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,5	Dinas Komunikasi dan Informatika
20.	Statistik											
43)	Persentase ketersediaan data Statistik sektoral Provinsi Kepri	Jumlah data/statistik sektoral Provinsi Kepri yang disusun dibagi jumlah sektor dikali 100	%	0	0	0	20	25	30	35	35	Dinas Komunikasi dan Informatika
21.	Persandian											
44)	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Jumlah Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dibagi Jumlah Perangkat Daerah dikali 100	%	NA	NA	10	20	30	40	50	50	Dinas Komunikasi dan Informatika
22.	Koperasi dan UKM											
45)	Persentase UKM yang naik kelas/aktif	Jumlah UKM yang naik kelas/aktif dibagi jumlah UKM dikali 100	%	0	0,21	0,27	0,34	0,48	0,62	0,75	0,75	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Indikator Kinerja Daerah	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja					Kondisi Kinerja akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
46)	Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Produk diterima dipasar modern atau tersertifikasi	Jumlah Koperasi dan UKM yang memiliki Produk diterima dipasar modern atau tersertifikasi dibagi Jumlah Koperasi dan UKM dikali 100	%	NA	17,8	18,5	19,2	20,19	21,22	22,25	22,25	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
23. Penanaman Modal												
47)	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	Rp Milyar	10.065	7.108	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100	45.608	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
48)	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Rp Milyar	1.384	492.5	500	600	700	800	900	3.993	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
24. Kepemudaan dan olah raga												
49)	Jumlah atlet berprestasi olahraga tingkat regional/nasional/internasional	Jumlah atlet berprestasi olahraga tingkat regional/nasional/internasional	Penghargaan	6	5	15	5	17	18	19	74	Dinas Kepemudaan dan olah raga

No	Indikator Kinerja Daerah	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja					Kondisi Kinerja akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
25.	Kebudayaan											
50)	Persentase bangunan yang berciri khas melayu	Jumlah bangunan milik Pemerintah dan swasta yang berciri khas melayu dibagi Jumlah bangunan milik Pemerintah dan swasta dikali 100	%	0	5,28	6,02	16,54	32,33	49,70	70,75	70,75	Dinas Kebudayaan
51)	Persentase Warisan Budaya Tangible yang Lestari	Jumlah warisan budaya yang lestari dibagi jumlah warisan budaya dikali 100	%	14,97	18,53	19,58	20,28	20,98	21,68	22,38	22,38	Dinas Kebudayaan
26.	Perpustakaan											
52)	Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	(Jumlah Pengunjung Perpustakaan yang tahun sekarang dikurangi jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2015) dibagi jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2015 dikali 100	%	63.200 pengunjung	20,25	21,84	25,00	26,58	29,75	32,91	32,91	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
27.	Kearsipan											
53)	Persentase Peningkatan Dokumen Arsip Daerah yang diselamatkan	(Jumlah arsip tahun sekarang dikurangi jumlah arsip tahun 2015) dibagi jumlah arsip tahun 2015 dikali 100	%	10.439 arsip	0,22	0,70	1,18	1,66	2,14	2,62	2,62	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Indikator Kinerja Daerah	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja					Kondisi Kinerja akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
28.	Kelautan dan Perikanan											
54)	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	375.412,66	303.411,28	304.019,32	304.628,57	305.239,05	305.850,75	306.463,67	306.463,67	Dinas Kelautan dan Perikanan
55)	Jumlah produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	33.515,48	33.582,65	33.649,95	33.717,38	33.785,95	33.852,66	33.920,50	33.920,50	Dinas Kelautan dan Perikanan
56)	Jumlah produk olahan Hasil perikanan (Ton)	Jumlah produk olahan Hasil perikanan (Ton)	Ton	1.315,67	1.318,30	1.320,94	1.323,58	1.326,23	1.328,88	1.331,54	1.331,54	Dinas Kelautan dan Perikanan
29.	Pariwisata											
57)	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Juta orang	2,03	2,1	2,2	2,25	2,3	2,4	2,5	2,5	Dinas Pariwisata
30.	Energi dan Sumber Daya Mineral											
58)	Rasio Elektrifikasi	Jumlah rumah tangga teraliri listrik dibagi jumlah rumah tangga dikali 100	%	83,72	89,14	89,15	90,50	91,50	92,50	93,50	93,50	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
31.	Perdagangan											
59)	Nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal	Nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal	Juta US \$	1.112,40	1.185,67	1.258,94	1.332,21	1.405,48	1.478,75	1.550,20	1.550,20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
60)	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Jumlah PDRB sektor perdagangan dibagi jumlah PDRB dikali 100	%	8,03	8,11	8,19	8,27	8,35	8,44	8,52	8,52	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Indikator Kinerja Daerah	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja					Kondisi Kinerja akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
32.	Perindustrian											
61)	Jumlah industri berbahan baku lokal	Jumlah industri berbahan baku lokal	unit	1.251	1.276	1.720	1.850	1.969	2.117	2.200	2.200	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
33.	Perencanaan Pembangunan											
62)	Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir	Jumlah usulan masyarakat dalam musrenbang yang terakomodir dibagi jumlah usulan masyarakat dalam musrenbang di kali 100	%	25,00	28,00	>30,00	>31,00	>33,00	>34,00	>36,00	>36,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
63)	Persentase Keselarasan Renja PD dengan Renstra PD	Jumlah kegiatan dalam renja Perangkat Daerah (PD) yang sama dengan renstra PD dibagi jumlah kegiatan dalam renja PD dikali 100	%	NA	NA	NA	84,00	85,00	86,00	87,00	87,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
34.	Penelitian dan Pengembangan											
64)	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder	Jumlah hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder dibagi Jumlah hasil kelitbangan dikali 100	%	NA	NA	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	65,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

No	Indikator Kinerja Daerah	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja					Kondisi Kinerja akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
35. Keuangan												
65)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Trilyun Rupiah	1,013	1,079	1,213	1,224	1,330	1,457	1,624	1,624	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi
66)	Opini BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Riau	Opini BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Riau	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Inspektorat Daerah
36. Sekretariat DPRD												
67)	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.	%	-	60	62	64	66	68	70	70	Sekretariat DPRD
37. Kepegawaian												
68)	Indeks Profesionalitas Pegawai	Nilai Perhitungan IPP ASN Provinsi Kepulauan Riau	Nilai	NA	NA	70	72	75	78	80	80	Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
38. Sekretariat Daerah												
69)	Persentase Mubaligh yang tersertifikasi	Jumlah mubaligh yang lulus kompetensi dibagi mubaligh yang dibina x 100	%	N/A	N/A	N/A	25	50	80	100	100	Biro Kesejahteraan Rakyat
70)	Persentase santri yang menjadi hafiz	Jumlah santri yang menjadi hafiz dibagi jumlah santri di kepulauan riau dikali 100	%	N/A	N/A	20	40	60	80	100	100	Biro Kesejahteraan Rakyat

No	Indikator Kinerja Daerah	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja					Kondisi Kinerja akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
71)	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skala A - E	B	B	B	B	B	B	B	B	Biro Organisasi dan Korpri
72)	Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepri	Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepri	Angka	41,15	60	63	67	70	72	75	75	Biro Organisasi dan Korpri
39. Pengawasan												
73)	Nilai hasil evaluasi SAKIP	Nilai hasil evaluasi SAKIP	Kategori	CC	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB	Inspektorat, Barenlitbang, Biro Organisasi dan Korpri
74)	Level Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Level Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Level	1	2	3	3	3	3	3	3	Inspektorat Daerah
75)	Level Maturitas SPIP Provinsi Kepulauan Riau	Level Maturitas SPIP Provinsi Kepulauan Riau	Level	1	2	3	3	3	3	3	3	Inspektorat Daerah
C Aspek Daya Saing												
76)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perijinan Satu Pintu (PTSP)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perijinan Satu Pintu (PTSP)	nilai	NA	81	81	84	86	88	90	90	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu